

PERAN LIGA ARAB DALAM PEMULIHAN SURIAH PASCA PERANG SIPIL SURIAH 2011-2023

Gusti Dhika Ananda¹

Abstract: Aims to explain the role of the international organization League of Arab State (LAS) in restoring Syria after the civil war. The type of research used in this research is descriptive using secondary sources obtained through library studies, book sources, internet, news, articles and journals related to the research. This research was analyzed using qualitative data analysis techniques. At first, the civil war in Syria was caused by the arrest of students in the city of Dara by the Syrian government. The students were arrested for carrying out vandalism on the city walls with the phrase "the people want the regime down". The student's arrest then caused the community to become angry and hold massive protests. The Syrian government responded to the protests with violence, such as arresting demonstrators, shooting demonstrators, kidnapped civilians, and carrying out beatings, even using weapons. Demonstrations by the community and the government's response caused civil war to occur. The civil war then caused many losses, such as the decrease of the Syrian economy and the large number of refugees which was difficult to contain. In this case, LAS has made various efforts to deal with the civil war in Syria which has been going on for more than a decade. Efforts made by LAS include creating meetings forum, deploying a monitoring team, imposing sanctions in the form of an embargo, prohibiting transactions with the Syrian central bank, and even suspend Syria from LAS membership. However, even though it has been issued, the civil war in Syria continues. Afterwards, LAS also collaborated with the UN by appointing Kofi Annan as UN Secretary General as a special representative with the aim of stopping all forms of violence and making peace resolutions. After 11 years, LAS returned Syria's membership, until LAS member countries agreed to help Syria overcome the impact of the civil war.

Keywords: League of Arab State, LAS, Syria, Civil War, Role, Recovery, Penalty.

Pendahuluan

Konflik internal merupakan hal yang sering terjadi dalam politik internasional. Konflik tersebut biasanya juga melibatkan kekerasan yang menimbulkan banyak kerugian, kematian, keadaan politik yang tidak stabil, dan terhambatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta sosial. Selain itu, konflik internal juga menyebabkan keamanan nasional menjadi tidak stabil dan dapat mempengaruhi perdamaian dunia. Perang sipil adalah konflik antara negara dengan satu atau lebih organisasi non negara di wilayah teritorial negara tersebut (Britannica, 2023). Di Suriah, perang sipil merupakan konflik internal yang dimulai pada bulan Maret 2011. Konflik ini pada awalnya dipicu oleh *Arab Spring*, yang merupakan gelombang protes terhadap pemerintah yang terjadi di negara-negara Arab.

Pada awalnya perang sipil disebabkan oleh protes terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang telah memerintah selama 30 tahun dan dinilai diktator, serta penangkapan pelajar di Kota Daraa yang menulis graffiti anti pemerintah. Namun, tindakan tersebut direspon dengan kekerasan oleh pemerintah. Melihat hal tersebut,

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : gustidhika76@gmail.com.

kelompok oposisi mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Assad, sehingga perang sipil pun terjadi.

Sebelum perang sipil terjadi, warga Suriah memprotes tentang besarnya angka pengangguran, korupsi di lingkungan pegawai negeri, dan kurangnya kebebasan dalam berpolitik. Masyarakat juga kurang puas dengan pemerintahan Bashar Al-Assad karena pemerintahannya melakukan sistem otoriter, dan hal tersebut terjadi selama 30 tahun.

Menurut Fahham dan Kataatmaja, perang sipil yang terjadi di Suriah dapat mengakibatkan dampak-dampak sosial, seperti gangguan mental, depresi, trauma dan keinginan untuk bunuh diri. Anak-anak korban perang juga cenderung memiliki gangguan perkembangan dan pertumbuhan, memiliki gangguan tidur, kemampuan dalam akademik berkurang (Kartaatmaja dan Muchaddam, 2016). Perang sipil juga berdampak pada perekonomian Suriah, menurut Badan Bantuan Kebutuhan dan Kerusakan Bank Dunia menyatakan kerusakan di enam ibu kota provinsi Suriah diperkirakan mencapai \$3,7 miliar sampai \$4,5 miliar dolar pada desember 2014 (*World Bank*, 2016).

Perang sipil menyebabkan penduduk Suriah harus mencari perlindungan ke negara lain, sehingga negara-negara tersebut menghadapi masalah meskipun tidak terlibat secara langsung dalam perang di Suriah. Salah satu negara yang menjadi tujuan pengungsi Suriah adalah Turki. Di negara tersebut sempat terjadi aksi protes karena kurangnya persediaan yang tidak memadai. Selain itu negara penerima pengungsi juga kesulitan untuk memenuhi saranan dan prasaran yang dibutuhkan pengungsi. Anak-anak dan wanita juga rentan terhadap resiko eksploitasi dan penyelundupan manusia.

Syrian Network for Human Rights (SNHR), Maret 2023, perang sipil Suriah setidaknya telah memakan korban jiwa lebih dari 230 ribu warga sipil. Termasuk 15.272 warga yang meninggal karena penyiksaan. Selain itu 154.817 orang ditangkap secara paksa dan dianggap hilang (SNHR, 2023).

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), jumlah korban sesungguhnya dapat mencapai lebih dari 600 ribu orang (BBC, 2023). Namun angka tersebut hanya menjelaskan jumlah korban yang terdampak oleh aktivitas perang, tidak memasukkan jumlah korban yang terdampak akibat rendahnya akses terhadap makanan, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Banyak aktor yang menerapkan berbagai upaya politik untuk mencegah meluasnya konflik dari Suriah ke negara-negara sekitarnya, termasuk Liga Arab (*League of Arab States*, LAS). LAS merupakan organisasi yang dibentuk pada tahun 1945 dan beranggotakan negara-negara dari kawasan Arab. LAS sendiri telah berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Pada awal konflik Suriah, LAS saat itu dipimpin oleh Nabil Al-Arabi, yang merupakan seorang diplomat mesir yang menjadi Sekretaris Jenderal LAS sejak Juli 2011. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir saat pemerintahannya Essam Sharaf dari Maret sampai Juni 2011.

Pada awal konflik LAS belum mengambil kebijakan yang tegas terhadap Assad, dengan harapan bahwa Assad dapat melakukan negosiasi untuk menghentikan konflik sipil di negara tersebut (Dakhlallah, 2012). Lalu, pada bulan November 2011, pemerintah Suriah mengepung kota-kota di Suriah sehingga lebih dari 250 ribu warga Suriah tewas. Banyaknya korban tersebut membuat LAS membuat misi perdamaian untuk meminta pemerintah Suriah menghentikan kekerasan yang dilakukan kepada pengunjuk rasa, memindahkan tank dan alat perang lainnya, dan membebaskan tahanan politik. Inisiatif dari LAS tersebut disetujui oleh para pejabat Suriah.

Kerangka Teori Teori Organisasi Internasional

Terdapat beberapa aktor yang dinilai penting perannya dalam politik dan diplomasi internasional, salah satunya adalah organisasi internasional. Organisasi internasional dianggap penting karena organisasi internasional bisa memberikan nilai-nilai positif yang menguntungkan negara-negara anggotanya, seperti saling berbagi antar anggota dan memperkuat hubungan antar negara. Menurut Stephen Krasner, organisasi internasional membantu negara-negara dominan untuk mengurus sistem internasional agar lebih menguntungkan. Lalu, bagi negara-negara kecil, dengan bergabung kepada suatu organisasi internasional, mereka akan diuntungkan secara politik dan ekonomi. Dalam politik, artinya mereka mendapat suara di dunia internasional, sedangkan dari sisi ekonomi, mereka bisa mendapat bantuan ekonomi atau teknologi dari negara yang lebih kuat. Peran organisasi internasional merupakan salah satu teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Clive Archer. Menurut Clive Archer, teori peran organisasi internasional hadir untuk melihat dan membagi peran sebuah organisasi dalam politik internasional kontemporer dengan banyaknya interaksi antar aktor dalam hubungan internasional. Selain itu, teori ini juga melihat bagaimana fungsi dari sebuah organisasi internasional pada suatu isu hubungan internasional. (Archer, 2001)

Peran organisasi internasional sendiri dibagi menjadi tiga. Peran pertama adalah sebagai instrumen, yang mana organisasi internasional dijadikan sebagai instrumen pendukung bagi negara-negara anggotanya untuk memenuhi kepentingan nasional (Archer, 2001). Oleh karena itu, fungsi organisasi internasional pada perannya sebagai instrumen dapat dilihat sebagai perpanjangan tangan sekaligus media bagi negara-negara anggota dalam mencapai tujuannya, yang mana instrumen tersebut dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu anggotanya. Selanjutnya, peran kedua dari organisasi internasional adalah perannya sebagai arena. Dalam peran sebagai arena, organisasi internasional berperan sebagai arena atau forum bagi sebuah rezim atau negara-negara anggotanya. Hal ini membuat organisasi internasional menjadi mediator yang menyediakan tempat pertemuan atau forum, wadah diskusi, sekaligus sebagai tempat untuk menyepakati suatu perjanjian sehingga organisasi internasional dalam hal ini bertindak netral (Archer, 2001). Fungsi dari peran organisasi internasional sebagai arena sendiri bersifat sebagai mediator. Hubungan internasional pada dasarnya membutuhkan aktor netral pada resolusi konflik atau pembuatan rezim internasional. Maka dari itu, organisasi internasional menyediakannya melalui peran sebagai arena. Kemudian, peran ketiga adalah peran organisasi internasional sebagai aktor independen. Konteks peran organisasi sebagai aktor dijelaskan bahwa organisasi internasional sepenuhnya bertindak sebagai aktor independen. Oleh karena itu, organisasi internasional dapat bertindak atau membuat kebijakan tanpa adanya pengaruh maupun intervensi dari pihak luar (Archer, 2001). Maka kapasitas aktor dalam peran organisasi internasional bergantung pada resolusi, rekomendasi, dan perintah yang diberikan (Archer, 2001).

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif tentang peran Liga Arab dalam pemulihan Suriah pasca perang sipil 2011-2023. Dalam meneliti, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber buku, internet, berita, artikel, dan jurnal yang

berkaitan dengan penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Konflik Suriah

Suriah adalah negara yang terletak di bagian barat Asia tepatnya di Timur Tengah. Suriah memiliki nama lengkap Republik Arab Suriah (*Syrian Arab Republic / Al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah al-Suriyyah*). Suriah memiliki luas 185.180 km² termasuk wilayah dataran tinggi Golan seluas 1.295 km² yang saat ini diduduki Israel secara illegal. Suriah berbatasan langsung dengan Turki di bagian utara, Irak di bagian Timur, Laut Tengah dan Lebanon di bagian Barat, serta Yordania dan Israel di bagian Selatan. Suriah terbagi menjadi 14 wilayah provinsi, yaitu; Damaskus, Rifdimashq, Lattakia, Idlib, Aleppo, Homs, Tartus, Hama, Deir ez Zur, Raqqa, Al-Haakah, Al-Suwadya, Dar'aa, Quneitra. Suriah menjadi negara yang diperebutkan berbagai negara dari segi politik. Sumber daya alam tersebut meliputi minyak mentah dan pipa gas (Herlambang, 2018). Pada tanggal 21 Februari 1971, Hafez Al-Assad diangkat menjadi presiden Suriah yang ke-18 dan merupakan presiden Suriah dalam 3 kali masa jabatan, hingga 10 Juni 2000. Pada masa pemerintahan Hafez, dia memperkuat kekuasaannya dengan memaksakan pengawasan masal pada Masyarakat dan menjalankan militer yang diktator, hal ini di tandai dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia, penahanan sewenang wenang, pembunuhan dan menghapus kaum konservatif (Widyarsa, 2012). Setelah meninggalnya Hafez, kekuasaannya digantikan oleh anaknya, yaitu Bashar Al-Assad.

Naiknya Bashar Al-Assad menjadi presiden Suriah, menyebabkan masyarakat Suriah menaruh harapan besar tentang reformasi politik yang dapat menopang dan menguatkan kepentingan-kepentingan di Suriah. Bashar Al-Assad melanjutkan kepemimpinan ayahnya dengan tergabung dalam partai Ba'ath Suriah, ia juga melanjutkan langkah politik ayahnya dengan meneruskan perjuangan ayahnya. Dalam memimpin Suriah Bashar Al-Assad menerapkan beberapa kebijakan, seperti mengupayakan proses damai negara-negara Arab dengan Israel, hadirnya militer Suriah di Lebanon, dan hubungan Suriah dalam sektor regional dan internasional. Lalu dalam politik Bashar Al-Assad melakukan sistem politik satu partai yang di dominasi oleh militer.

Pada awalnya, dibawah pimpinan Bashar Al-Assad, Suriah mengalami banyak kemajuan di bidang ekonomi dengan melakukan sistem ekonomi pasar terbuka, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan di Suriah secara mandiri sejak tahun 2006. Bashar Al-Assad juga berhasil menaikkan *Human Development Indeks* (HDI) di Suriah. HDI merupakan penilaian atas berhasilnya pembangunan dalam sebuah negara yang berpatokan pada pendapatan penduduk, angka harapan hidup, tingkat Pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, pemerintahan Bashar Al-Assad di terima oleh mayoritas warga Suriah. Namun kebijakan ekonomi yang dilakukan Bashar Al-Assad dikuasai oleh orang-orang yang berhubungan dengan rezim yang berkuasa, sehingga banyak korupsi yang terjadi dalam kalangan pemerintah.

Setelah bertahun-tahun memerintah, pemerintahan Bashar dinilai tidak efektif karena besarnya angka pengangguran, korupsi di lingkungan pegawai negeri, dan kurangnya kebebasan dalam berpolitik yang menyebabkan banyak terjadinya protes dan

demonstrasi. Suriah juga kesulitan memenuhi kebutuhan nasionalnya sejak kekeringan ekstrim melanda kawasan Timur Tengah. Kekeringan tersebut terjadi di tahun 2007 yang menyebabkan langkanya cadangan air di 160 desa di Suriah. Pada tahun 2005 sampai tahun 2010, lebih dari 85% ternak mati karena kekeringan. Kekeringan juga menyebabkan para petani di desa meninggalkan daerahnya dan masuk ke kota-kota di Suriah. Mereka membangun gubuk dimana-mana, dan layanan seperti air, listrik, pendidikan, dan kesehatan sulit dijangkau. Kondisi yang semakin buruk tersebut menyebabkan masyarakat Suriah frustrasi dan menginginkan terjadinya perubahan di Suriah. Namun pada saat itu presiden Bashar Al-Assad tidak meringankan dampak bencana yang terjadi di Suriah. Kemarahan masyarakat Suriah semakin bertambah besar karena di picu oleh *Arab Spring*, yang merupakan gelombang protes yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Arab Spring memicu masyarakat Suriah untuk turut serta memprotes pemerintah Suriah. Puncak kemarahan yang dirasakan masyarakat Suriah pada awalnya diawali dengan aksi pembakaran diri yang dilakukan oleh Hassan Ali Akleh pada tanggal 26 Januari 2011, aksi tersebut terinspirasi dari pembakaran diri di Tunisia. Selanjutnya, aksi protes terhadap pemerintahan terjadi yang diawali dengan adanya beberapa pelajar di kota Dar'a yang terpengaruh oleh *Arab Spring* dan kemudian melakukan vandalisme di tembok-tembok kota di Suriah dengan kalimat "rakyat menginginkan rezim turun" pada bulan Maret 2011 (Kartaatmaja, 2016). Aksi protes tersebut kemudian direspon pemerintah dengan menangkap para pelajar serta memukuli dan menyiksa mereka. Sebagai respon dari penangkapan tersebut, masyarakat-kelompok oposisi pun akhirnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang dipimpin Assad. Masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran. Hal tersebut kembali diatasi pemerintah dengan kekerasan serta penangkapan massal dan penembakan terhadap demonstran. Respon pemerintah dan demonstrasi yang berkelanjutan tersebut kemudian menyebabkan perang sipil terjadi. Semakin besarnya gelombang protes yang terjadi di kota-kota Suriah, pemerintah Suriah juga merespon dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu dengan mengepung kota yang menjadi pusat demonstran seperti Baniyas atau Homs, dengan mengeluarkan kendaraan berat seperti tank, artileri, dan helikopter. Tentara Suriah (*Syrian Arab Army*, SAA) merupakan kekuatan utama Bashar Al-Assad untuk menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok oposisi. Keadaan diperburuk dengan putusnya alat komunikasi, banyaknya korban yang berjatuh, dan penduduk yang terputus dari makanan, saluran air, obat-obatan, dan saluran listrik (Britannica, 2024).

Liga Arab

Timur Tengah merupakan Kawasan yang rawan mengalami konflik dan peperangan. Organisasi Internasional Liga Arab merupakan salah satu aktor dalam Hubungan Internasional yang berdiri untuk menjaga perdamaian, serta mengupayakan dilaksanakannya resolusi konflik terhadap permasalahan yang melibatkan negara-negara anggota Liga Arab. Liga Arab (*League of Arab States*, LAS) adalah organisasi yang menaungi negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang didirikan di Kairo, Mesir pada tanggal 22 Maret 1945, Organisasi ini dibentuk setelah ditanda tangannya Protokol Alexandria oleh 5 negara Arab pada 7 Oktober 1944. LAS kemudian didirikan oleh 7 negara, yaitu Mesir, Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman. Dalam piagam Liga Arab disebutkan bahwa organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mempererat hubungan negara-negara Arab, menajaga independensi

serta koordinasi kebijakan negara-negara anggota Liga Arab, melakukan kerjasama dalam bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan hal-hal lain yang lebih luas, dan mengatur hubungan ekonomi dan sosial untuk menjaga perdamaian dan keamanan.

Saat ini LAS dipimpin oleh Ahmed Aboul Gheit sebagai sekretaris jenderal, dengan ketua parlemennya Ali Al-Daqaashi, dan beranggotakan 22 negara, yaitu Aljazair, Bahrain, Komoro, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Selain itu terdapat 4 negara yang diijinkan sebagai pengamat, yaitu: Brazil, Eritrea, India, dan Venezuela. Negara-negara pengamat tidak berhak memilih, namun mereka dapat memberikan pendapat. Pada hal institusional, Liga Arab terbagi menjadi 3 badan, yaitu Dewan, Sekretariat Permanen, dan Komite Permanen. Negara-negara anggota Liga Arab memiliki kursi dan suaranya masing-masing dalam sidang dewan Liga Arab. Dewan berkewajiban mengintervensi konflik apabila konflik tersebut memicu perang antar negara anggota. Keputusan yang diambil dalam dewan Liga Arab hanya mengikat negara-negara yang menyetujui keputusan tersebut.

Pact of The League of Arab States (Pakta Liga Arab) merupakan konstitusi dasar bagi anggota LAS. LAS juga dijadikan sebagai media penyusunan dokumen-dokumen penting Arab dalam mendukung integritas ekonomi antar negara anggota seperti pembentukan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Arab (*Joint Arab Economic Action Charter*) yang di ajukan oleh Libya

Peran LAS Dalam Pemulihan Pasca Perang Sipil.

A. LAS Sebagai Instrumen

Pada konteks LAS, sebagai instrumen, LAS pada awalnya tidak bertindak apa-apa karena berharap Suriah dapat menyelesaikan masalah internal yang terjadi di negaranya dapat diselesaikan sendiri, dan juga LAS khawatir akan terjadi efek domino dari Suriah ke negara-negara Arab lainnya. Akan tetapi, pada Oktober 2011, LAS mengadakan pertemuan resmi yang menghasilkan pembentukan Komite Suriah diketua Qatar dengan anggota Algeria, Mesir, Oman, dan Sudan. Komite Suriah selanjutnya menemui Presiden Bashar Al-Assad dan menyatakan keputusan LAS untuk meminta Suriah menghentikan segala bentuk kekerasan, membebaskan tahanan politik, membangun dialog dengan oposisi, dan memberikan izin masuk bagi pengamat dan media internasional (Black,2011). Namun keengganan pemerintah Suriah untuk membangun dialog dengan oposisi, ditambah dengan jumlah korban tewas dalam konflik yang mencapai 3.500 orang, memunculkan respon negatif dari LAS yang selanjutnya memutuskan untuk menghentikan keanggotaan Suriah pada 12 November 2011 (MacFarquhar, 2011).

B. LAS Sebagai Arena

Peran LAS sebagai arena dapat dilihat dari bagaimana LAS menyediakan forum bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan pertemuan dengan tujuan membahas posisi LAS terhadap pemerintahan Suriah. Pada Januari 2012, LAS mengadakan pertemuan tertutup di Kairo dengan tujuan untuk membahas tentang rancangan perdamaian yang selanjutnya disalurkan ke PBB. Rancangan perdamaian tersebut menekankan pada beberapa poin, yakni peralihan kekuasaan dari Presiden Assad ke wakil presidennya, pembentukan pemerintahan kesatuan nasional dalam dua bulan, dan

pelaksanaan pemilu (Al Arabiya, 2012). Perdebatan internal muncul ketika sebagian negara Arab enggan untuk mengajukan rancangan tersebut ke PBB karena menganggap bahwa intervensi dari aktor eksternal tidak diperlukan dalam penyelesaian konflik Suriah. Pertemuan resmi PBB pun dilaksanakan pada 31 Januari hingga 4 Februari 2012 untuk membahas rancangan resolusi yang diajukan oleh LAS. Rancangan tersebut selanjutnya disetujui oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki, tetapi tidak disetujui dari Rusia dan Tiongkok, yang membuat rancangan itu tidak dapat diadopsi (TM, 2014).

LAS kembali mengadakan pertemuan resmi pada 11 Februari 2012 yang selanjutnya menghasilkan keputusan untuk menindak tegas sikap Suriah. Hal itu dilakukan dengan mengirimkan pasukan perdamaian gabungan dengan PBB untuk membantu oposisi Suriah secara ekonomi dan politik (Stack & MacFurqahar, 2012). Upaya LAS untuk meminta PBB melakukan intervensi terhadap Suriah pada tahun 2013 selanjutnya diwujudkan ke dalam aksi kerja sama antara LAS dan PBB. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan penunjukkan Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan sebagai Perwakilan Khusus pada Februari 2013 (UN, 2012).

Minimnya peran LAS dalam upaya pemulihan konflik Suriah bertahan hingga setidaknya tahun 2023. Namun, pada Mei 2023, LAS mengadakan pertemuan darurat di Kairo yang selanjutnya menghasilkan keputusan untuk mengembalikan keanggotaan Suriah di LAS. Keputusan simbolis ini disetujui oleh 13 dari 20 negara anggota LAS, dengan satu penolakan dari Qatar (Toninelli, 2023).

C. LAS Sebagai Aktor Independen

Posisi dari organisasi internasional menunjukkan kepentingan dari negara, organisasi, partai politik, atau kelompok lain yang menjadi anggotanya. Kondisi itu membuat posisi organisasi internasional diperebutkan oleh anggota yang memiliki pengaruh kuat, sehingga kesempatan bagi organisasi untuk bertindak independen dinilai minimal (Archer, *International Organizations*, 2001). Dengan kata lain, hampir tidak mungkin organisasi internasional bertindak sebagai aktor independen tanpa pengaruh dari aktor lain, karena pada dasarnya posisi organisasi internasional dibentuk oleh negara-negara yang ada di dalamnya.

Hal tersebut juga terjadi pada konteks peran LAS dalam pemulihan pasca konflik Suriah. Berdasarkan peran LAS sebagai instrumen dan arena, dapat dilihat bahwa hampir semua keputusan dan aktivitas LAS didasari oleh kepentingan dari negara-negara anggotanya. Sebagai contoh, LAS pada tanggal 23 Januari 2012 meminta Presiden Assad untuk mundur dari pemerintahannya dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara Arab untuk mengurangi pengaruh Suriah—dan Iran—di kawasan, karena bertahannya pemerintahan Assad dapat diartikan sebagai bertahannya rezim Syiah di Suriah, yang akhirnya memperkuat pengaruh regional dari Iran.

Selain itu, pada bulan 19 Desember 2011, LAS membuat kesepakatan kepada Assad untuk menurunkan tim pengawas, Assad pun menandatangani perjanjian yang memperbolehkan tim pengawas untuk memantau pelaksanaan Suriah dalam melakukan rencana perdamaian yang diminta LAS. Pada 28 Januari 2012 dilakukannya penundaan misi tim pengawas karena pasukan keamanan Suriah masih saja melakukan kekerasan dan membunuh para pengunjuk rasa, membatasi pergerakan tim pengawas serta menyerang tim pengawas yang akhirnya menghasilkan berakhirnya peran LAS pada konflik Suriah.

Selain itu LAS juga meminta membebaskan tahanan politik termasuk penulis Suriah bernama Tayeb Tizini, aktivis HAM bernama Soheir Atasi, tujuh kerabat dari Kamal Labwani yang merupakan oposisi Suriah, dan pembebasan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan konflik. Lalu, LAS meminta Suriah untuk membangun dialog dengan oposisi, dan memberikan izin masuk bagi pengamat dan media internasional (Black, 2011).

Pada pertemuan di Kairo, Mesir tanggal 27 November 2011, LAS menerapkan sanksi terhadap Suriah, seperti larangan perjalanan bagi staf pemerintahan senior, pembekuan aset pemerintah Suriah di negara-negara Arab, larangan transaksi dengan bank sentral Suriah, dan penghentian perdagangan komersil dengan pemerintah Suriah (Küçükkeleş, 2012).

Selanjutnya, pada 23 Februari 2012, LAS bekerjasama dengan PBB menunjuk Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan sebagai utusan khusus perdamaian gabungan di Suriah (Britannica). Dalam melaksanakan tugasnya, pada 16 Maret, Annan memberikan 6 poin rencana perdamaian kepada DK PBB sebagai upaya perdamaian di Suriah. Selanjutnya pada 27 Maret, Annan, melalui juru bicaranya mengatakan pemerintah Suriah telah bersedia melaksanakan poin-poin rencana perdamaian tersebut.

Dinamika Suriah Pasca Kembali ke LAS

Dipulihkannya keanggotaan Suriah dalam LAS ditandai dengan kehadiran Bashar Al-Assad pada pertemuan di Arab Saudi pada tanggal 18 Mei 2023. Hal ini menunjukkan perubahan penting terhadap perjalanan pemerintahan Bashar Al-Assad. Kembalinya Suriah ke LAS juga menunjukkan kemenangan politik besar bagi pemerintah Suriah. Keputusan yang dibuat Liga Arab untuk mengembalikan keanggotaan Suriah setelah lebih dari 11 tahun menyatakan bahwa Suriah bisa kembali berpartisipasi dalam pertemuan LAS. LAS juga mendorong penyelesaian krisis yang timbul karena perang sipil termasuk mengungsinya penduduk Suriah dan penyelundupan narkoba. Sekretaris Jenderal LAS menyatakan meski Suriah telah Kembali menjadi anggota LAS, normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Suriah belum tentu terjadi. Keputusan tersebut di ambil oleh masing masing negara berdaulat.

Jordania, Arab Saudi, Iraq, Lebanon, Mesir, dan Sekretaris Jenderal LAS akan membentuk kelompok dan berkerja sama dengan pemerintah Suriah dalam upaya mencari Solusi untuk mengatasi Krisi akibat perang sipil, seperti memfasilitasi pengiriman bantuan di Suriah. Jordania juga berinisiatif untuk menyusun peta jalan yang diharapkan akan mengakhiri konflik Suriah, hal ini termasuk menangani pengungsi, tahanan hilang, dan penyelundupan narkoba.

Pada tanggal 16 Mei 2024 diadakan KTT LAS ke 33 di Manama, Bahrain. Para pemimpin regional membuat beberapa poin deklarasi, salah satunya berisi proses pemulihan hubungan terhadap Suriah. poin deklarasi tersebut menegaskan perlunya mengakhiri krisis Suriah yang sejalan dengan resolusi dewan keamanan 2254. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga keamanan, kedaulatan, dan integritas Suriah mencapai aspirasi rakyat, menghilangkan terorisme, dan memberikan ruang bagi perdamaian. Pengungsi di pulangkan secara aman. Deklarasi tersebut juga menekankan peran komite penghubung Arab dan inisiatif Arab merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan krisis akibat perang sipil (Pradipha, 2024).

Kesimpulan

Pada bulan Maret tahun 2011, terjadi perang sipil yang dipicu oleh Arab Spring. Arab Spring mempengaruhi Masyarakat Suriah dalam melakukan demonstrasi dan protes terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang telah memerintah selama 30 tahun. Dalam merespon aksi tersebut, pemerintah melakukan kekerasan, penangkapan massal, serta menembak para demonstran. Respon dari pemerintah serta demonstrasi yang semakin besar menyebabkan perang sipil di Suriah terjadi.

Selain itu, respon pemerintah juga menyebabkan beberapa kelompok oposisi mulai merespon dengan senjata untuk melawan pasukan keamanan pemerintah Suriah. Besarnya konflik tersebut menyebabkan warga sipil meninggalkan Suriah dan mengungsi ke negara lain. Perang sipil juga menyebabkan ketidakstabilan sosial dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi yang menimbulkan dampak sosial dan psikologis.

Dalam mengatasi perang sipil Suriah, LAS melakukan beberapa kebijakan, seperti menyediakan forum bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan pertemuan dengan tujuan membahas posisi LAS terhadap pemerintahan Suriah, meminta Presiden Bashar Al-Assad mundur dari pemerintahannya, meminta Suriah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, membebaskan tahanan politik, membangun dialog dengan oposisi, memberikan izin masuk bagi pengamat dan media internasional, memberi sanksi terhadap Suriah, hingga menghentikan keanggotaan Suriah dan mengajukan rancangan perdamaian yang selanjutnya di setujui oleh Kofi Annan dan di adopsi sebagai pernyataan DK PBB.

Pada tanggal 7 Mei 2023, Liga Arab kembali memasukkan Suriah sebagai anggota organisasi tersebut. Negara-negara anggota LAS sepakat untuk mengatasi ketidakstabilan di Suriah, dengan harapan mereka dapat menangani perdagangan narkoba, Krisis pengungsi, dan keamanan perbatasan yang lemah. Pada tanggal 18 Mei 2023, Bashar Al-Assad menghadiri KTT Liga Arab, hal ini menunjukkan perubahan penting bagi pemerintah Suriah.

Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London: Routledge.
- BBC. "Syria: *The story of the conflict*". 11 Maret 2016. Tersedia di <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>
- Britannica. "Syrian Civil War". 23 Januari 2024. Tersedia di <https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War>
- Britannica. "Arab League". Tersedia di <https://www.britannica.com/topic/Arab-League>
- Black, I. (2011, November 2). *Syrian acceptance of Arab League ceasefire plan met with scepticism*. Tersedia di *The Guardian*: <https://www.theguardian.com/world/2011/nov/02/syrian-acceptance-of-arab-league-ceasefire-plan>
- Dakhallah, Farah. "The Arab League in Lebanon: 2005-2008". *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 25, No. 1 (2012), 53-74.
- Herlambang. "Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah". *Jurnal Transborders*, Vol.1 No.2 (2018). Tersedia di <https://eprints2.undip.ac.id/eprint/844/2/Bab%201.pdf>

- Kartaatmaja dan Muchaddam. “Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya”. Tersedia di <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332/266>
- SNHR. “*On the 12th Anniversary of the Popular Uprising: A Total of 230,224 Civilians Documented as Dead, including 15,275 Who Died due to Torture, 154,871 Arrested and/or Forcibly Disappeared, and Roughly 14 Million Syrians Displaced*”. Tersedia di <https://snhr.org/blog/2023/03/15/on-the-12th-anniversary-of-the-popular-uprising-a-total-of-230224-civilians-documented-as-dead-including-15275-who-died-due-to-torture-154871-arrested-and-or-forcibly-disappeared-and-roughly-14/>
- MacFarquhar, N. (2011, November 12). *Arab League Votes to Suspend Syria Over Crackdown*. Tersedia di The New York Times: <https://www.nytimes.com/2011/11/13/world/middleeast/arab-league-votes-to-suspend-syria-over-its-crackdown-on-protesters.html>TM. (2014). The Arab League's Role in the Syrian Civil War. *Inquiries*, 6(7), 1-4.
- Toninelli, L. (2023, Mei 11). *Syria's Arab League Comeback: Regional Breakthrough or Premature Decision?* Retrieved from ISPI: <https://www.ispionline.it/en/publication/syrias-arab-league-comeback-regional-breakthrough-or-premature-decision-128416>
- UN. (2012, Februari 23). *Kofi Annan Appointed Joint Sepcial Envoy of United Nations, League of Arab States on Syrian Crisis*. Retrieved from United Nations Meetings Coverage and Press Release: <https://press.un.org/en/2012/sgsm14124.doc.htm>